

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN DIMODERASI
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL**

**THE EFFECT OF COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES,
UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
OPTIMIZATION OF ASSET MANAGEMENT ON THE
QUALITY OF STATEMENTS REPORT BY MODERATING
EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL**

ATRINA ARIYANI GAFAR



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**



TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN DIMODERASI
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL**

**THE EFFECT OF COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES,
UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
OPTIMIZATION OF ASSET MANAGEMENT ON THE
QUALITY OF STATEMENTS REPORT BY MODERATING
EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh:

**ATRINA ARIYANI GAFAR
P3400216033**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**



TESIS

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN DIMODERASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTENAL

disusun dan diajukan oleh

ATRINA ARIYANI GAFAR
P3400216033

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **25 Januari 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

Dr. Arifuddin S.E., Ak., M.Si., CA.
NIP 196406091992031003

Dr. H. Madris, DPS., S.E., M.Si
NIP 196012311988111002

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi

Dr. R.A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
196703191992032003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Atrina Ariyani Gafar
NIM : P3400216033
Jurusan / Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN DIMODERASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Atrina Ariyani Gafar

PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu Alaukum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas rahmat serta karunia Allah SWT yang telah memberikan segala hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama proses penyusunan tesis ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rendah hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Pasca Sarjana Unhas, serta Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Ibu Dr. R. A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA atas arahan dan bimbingannya.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Arifuddin., S.E.,Ak.,M.Si.,CA. dan Bapak Dr. Madris, DPS.,S.E.,M.Si, selaku tim penasehat I dan II, atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi untuk kelancaran penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Haliah, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. Ibu Dr. Kartini, S.E.,Ak.,M.Si.,CA., dan Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA., sebagai penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada peneliti mulai dari ujian proposal hingga penyelesaian tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati dan cinta kasih, penulis ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta H. Gafar Nur dan Hj. Nurmila yang senantiasa memberikan bantuan, nasihat, motivasi serta doa restu kepada penulis selama proses pembuatan tesis ini hingga selesai. Kepada kakak tercinta Gafar beserta keluarga atas doa dan dukungannya. Serta seluruh keluarga



besar terkhusus drh. Nurlina Saking, M.Kes, MH beserta keluarga (tante yang sudah seperti orang tua sendiri) terima kasih atas doa dan dukungan moril dan materilnya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, lingkup Sekretariat terkhusus Bagian Keuangan (Bapak H. Syamsul Rizal, S.Sos, selaku Kasubag Keuangan beserta seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doanya).

Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti tujukan kepada seluruh responden di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada seluruh teman-teman sejawat terkhusus pada Program Magister Akuntansi Angkatan 2016 atas motivasi dan kebersamaan sampai akhir studi, dan bagian akademik Program Magister Akuntansi. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu atas segala bantuannya selama peneliti menempuh pendidikan. Semoga semua pihak mendapat kebaikan serta perlindungan dari-Nya atas bantuan yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Wassalam.

Makassar, Januari 2019

Peneliti,



ATRINA ARIYANI GAFAR

ABSTRAK

ATRINA ARIYANI GAFAR. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Optimalisasi Pengelolaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Dimoderasi Efektivitas Pengendalian Intern,* (dibimbing oleh **Arifuddin** dan **Madris**).

Penelitian ini bertujuan memberikan ulasan tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan dengan dimoderasi efektivitas pengendalian intern.

Objek penelitian adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi sebanyak 159 orang dan teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan analisis data *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) optimalisasi pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (4) efektivitas pengendalian intern memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (5) efektivitas pengendalian intern tidak dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, (6) efektivitas pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi pengelolaan aset, efektivitas pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.



ABSTRACT

ATRINA ARIYANI GAFAR. *The Effect of Competence of Human Resources, Utilization of Information Technology and The Optimization of Asset Management on The Quality of Financial Report with Moderated The Effectiveness of Internal Control* (supervised by **Arifuddin** dan **Madris**).

This study aims to provide a review of the influence of human resource competencies, the utilization of information technology and the optimization of asset management on the quality of financial report with moderated effectiveness of internal control.

The object of the research is OPD in the scope of the South Sulawesi Provincial Government. The population was 159 people and the sampling technique used was purposive sampling method. Retrieving data using a questionnaire with data analysis Moderated Regression Analysis (MRA).

The results showed that (1) the competence of human resources had a significant effect on the quality of financial report, (2) the utilization of information technology had a significant effect on the quality of financial report, (3) the optimization of asset management had a significant effect on the quality of financial report, (4) the effectiveness of internal control moderate the influence of human resource competencies on the quality of financial report; (5) the effectiveness of internal control cannot moderate the effect of information technology on the quality of financial report; (6) the effectiveness of internal control moderates the effect of information technology on the quality of financial report in the government of South Sulawesi Province.

Keywords: competence of human resources, utilization of information technology, optimization of asset management, effectiveness of internal control, quality of financial report.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	9
2.1.1 <i>Goal Setting Theory</i>	9
2.1.2 <i>Technology Acceptance Model</i>	10
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	12
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	17
2.1.5 Optimalisasi Pengelolaan Aset/BMD.....	21
2.1.6 Efektivitas Pengendalian Intern.....	28
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan.....	30
2.2 Tinjauan Empiris.....	36
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	40
3.1 Kerangka Konseptual	40
3.2 Hipotesis.....	43
BAB IV METODE PENELITIAN	53
4.1 Rancangan Penelitian.....	53
4.2 Lokasi dan waktu penelitian.....	53
4.3 Populasi dan Sampel.....	53
4.4 Jenis dan Sumber Data	54
4.5 Metode Pengumpulan Data	55
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	56
4.7 Instrumen Penelitian	60
4.8 Teknik Analisis Data	60



BAB V HASIL PENELITIAN.....	66
5.1 Deskripsi Data	66
5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	68
5.3 Statistik Deskriptif	70
5.4 Uji Asumsi Klasik	78
5.5 Analisis Regresi.....	79
5.6 Pengujian Hipotesis.....	83
BAB VI PEMBAHASAN.....	88
6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	88
6.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	90
6.3 Optimalisasi Pengelolaan Aset Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	92
6.4 Efektivitas Pengendalian Internal dapat Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	94
BAB VII PENUTUP	98
7.1 Kesimpulan	98
7.2 Implikasi	99
7.3 Keterbatasan	100
7.4 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual	42



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1	Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia 56
4.2	Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi..... 57
4.3	Indikator Optimalisasi Pengelolaan Aset 58
4.4	Indikator Efektivitas Pengendalian Internal 59
4.5	Indikator Kualitas Laporan Keuangan..... 60
4.6	Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 62
5.1	Karakteristik Responden Penelitian 66
5.2	Hasil Pengujian Validitas 68
5.3	Hasil Pengujian Reliabilitas 70
5.4	Statistik Deskriptif Variabel 71
5.5	Deskripsi Variabel Kompetensi SDM (X1) 73
5.6	Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 74
5.7	Deskripsi Variabel Optimalisasi Pengelolaan Aset (X3)..... 75
5.8	Deskripsi Variabel Efektivitas Pengendalian Internal (X4) 76
5.9	Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 77
5.10	Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 79
5.11	Hasil Uji Regresi Sebelum Berinteraksi dengan Variabel Moderasi . 80
5.12	Hasil Uji Regresi dengan Variabel Moderasi X4 81



DAFTAR LAMPIRAN

1	Peta Teori	111
2	Daftar OPD Provinsi Sulawesi Selatan.....	121
3	Kuesioner Penelitian	123
4	Uji Asumsi Klasik.....	129
5	Uji Regresi	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia saat ini memasuki paradigma baru dimana salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintah adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel, dalam hal ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara melakukan perubahan yang mendasar dalam mengelola daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu indikator dari *good governance* adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (*Governmental Accounting Standards Board-GASB, Concepts Statement No.1. 1999*).

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah dan menilai kondisi keuangan.

Agar penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus didukung oleh teknologi informasi yang

(Arfianti, 2011). Hal pertama yang mempengaruhi proses penyusunan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi.



Seperti diketahui bahwa total volume APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002).

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Penyajian aset/barang milik daerah yang memiliki nilai material di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi sangat penting artinya bagi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan opini atas LKPD dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan aset/barang milik daerah.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan daerah, maka pengakuan/penilaian, penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Hal ini karena aset/barang milik daerah memiliki nilai yang signifikan dan kompleks. Nilai aset tetap pada LKPD relatif sangat material sehingga berpengaruh terhadap laporan neraca. Penilaian aset menjadi sangat penting karena akan berpengaruh pada penyusunan neraca.

Aset daerah merupakan bagian dari penyusunan neraca awal daerah.

Komponen aset masuk dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan barang

sifat persediaan merupakan bagian pengelolaan aset. Oleh karena itu,

aan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk

kan laporan keuangan yang baik, terlepas banyak tidak aset yang

kan dalam neraca daerah (Yusuf, 2010). Pengelolaan aset yang baik



akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang baik juga yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian opini oleh BPK sehingga dapat terwujud opini WTP.

Menurut Hidayati, *et al.* (2016), lemahnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan pada kasus tertentu, ada daerah yang bahkan mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang disebabkan kurang mampuan mewujudkan tata kelola aset/barang pemerintah daerah secara baik (Ferdianus, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo, dkk (2012) terhadap 3 (tiga) Pemda di Indonesia terungkap bahwa lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah disebabkan oleh: (1) Reformasi masih pada tahap awal; (2) Terbatasnya kapabilitas SDM; (3) Lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan; dan (4) Rendahnya fungsi manfaat aset.

Dalam studi lain oleh Hanis, dkk (2011) pada Pemda yang berbeda, diketahui pula bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah seperti: (1) Belum komprehensifnya kerangka kebijakan; (2) Persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah; (3) Inefisiensi; (4) Keterbatasan data; dan (5) Keterbatasan SDM.

Pengelolaan aset/barang milik daerah bukan pekerjaan yang mudah. Ini terbukti dengan masih banyaknya pengecualian kewajaran laporan atas nilai

pemerintah daerah dalam opini Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menandakan bahwa pengelolaan aset menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.



Faktor lainnya yang dapat memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yaitu Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (ESPIP). Penerapan pengendalian intern yang efektif dalam organisasi akan menghasilkan atau menjamin pelaksanaan pembukuan secara obyektif, benar, dan dapat dipercaya. Tujuannya, dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission* (COSO). Menurutnya ada 3 tujuan pengendalian intern yaitu: tujuan efisiensi dan efektivitas operasi, tujuan keandalan laporan keuangan, dan tujuan kepatuhan pada hukum dan regulasi (Haliah, 2013).

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Mahmudi (2015:4) menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sehingga informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Secara teoritis, Hanifa *et al.*, (2016), Andini dan Yusrawati (2015), Patra *et al.*, (2015), Nurillah dan Muid (2014), Dewi dan Mimba (2014), Alfian (2014), Nuryanto dan Afiah (2013), Haliah (2013), menyatakan bahwa laporan keuangan

berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sesuai Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terkandung dalam Undang-



Undang No. 24 tahun 2005 mengadopsi karakteristik kualitatif sebagaimana tercantum dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 2.

Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Governmental Accounting Standards Board – GASB, Concepts Statement No.1, 1999). Selain itu informasi laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis kurangpercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dengan adanya berbagai skandal keuangan (Haliah, 2013).

Penelitian yang dilakukan Zuliarti (2012), Sukmaningrum, *et al* (2012), Syarifudin (2014), serta Imelda (2016) menemukan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Sedangkan Surastiani dan Handayani (2015) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruswanto, *et al* (2017) dan Setyowati, *et al* (2016) menemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Sedangkan menurut Febrian, *et al* (2015), Imelda (2016), serta Evelyn (2017), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Gamara, *et al* (2015), Yunita (2016), Esa (2017) dan Bayu (2017) menemukan bahwa optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Hadiani, *et al* (2015) bahwa pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

fenomena yang ada (kenyataan) masih berbeda dengan harapan. Artinya, dengan adanya pemanfaatan sumber daya serta didukung oleh informasi yang memadai diharapkan dapat menghasilkan suatu



informasi laporan keuangan yang berkualitas yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didapati masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah disusun belum berkualitas, karena belum menyajikan data-data keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan. Disamping itu juga, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan berhasil ditemukan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (Wungow, 2016).

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka memotivasi peneliti untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Dimoderasi Efektivitas Pengendalian Intenal.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi pengelolaan aset, serta efektivitas pengendalian internal untuk peningkatan kualitas laporan keuangan belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka yang rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap

ualitas laporan keuangan.

Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan.

Apakah optimalisasi pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas



laporan keuangan.

4. Apakah efektivitas pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh optimalisasi pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan,

serta tentang kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan aset/barang milik daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan



dengan kompetensi sumber daya manusia, masalah pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi pengelolaan aset serta efektivitas pengendalian internal.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga lebih baik lagi dalam hal kualitas laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas hanya mengamati faktor-faktor yang memengaruhi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh tersebut hanya fokus pada kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi pengelolaan aset, dan efektivitas pengendalian internal.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan serta Pengurus Barang pada 53 OPD terdiri dari inspektorat, sekretariat, 26 OPD, 9 Biro, 9 Badan, 6 Rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Teori didefinisikan sebagai kristalisasi dari fenomena empiris dan dalil normatif yang disusun serta digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan dari fenomena dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek (*preposition*) yang dapat berlaku secara umum (Harahap, 2015). Sedangkan menurut Suwardjono (2010), teori merupakan sebuah hal yang tidak bersifat operasional atau masih pada tatanan abstrak atau sesuatu yang ideal yang merupakan lawan kata nyata, namun dikerjakan dalam dunia nyata.

Tujuan teori adalah menjelaskan dan memprediksi. Menjelaskan dalam artian menganalisis dan memberi alasan mengapa fenomena atau fakta seperti yang diamati. Sedangkan memprediksi berarti memberi keyakinan bahwa jika asumsi-asumsi atau syarat-syarat yang diteorikan dipenuhi, maka fenomena atau fakta tersebut kemungkinan besar akan terjadi.

2.1.1 Goal Setting Theory

Goal Setting Theory dikembangkan oleh Edwin A. Locke (1968). *Goal setting theory* adalah proses kognitif membangun tujuan dan merupakan determinan perilaku. Tujuan yang disadari akan menghasilkan tingkat prestasi lebih tinggi jika seseorang menerima tujuan tersebut (Locke, 1968). Sifat kognitif (proses mental) menurut (Locke, 1968) mencakup 4 (empat) hal, yakni (1) Keterincian tujuan, tujuan spesifik berkaitan dengan tingkat presisi kuantitatif tersebut (*goal specificity*); (2) Kesukaran tujuan ataupun tingkat keahlian dibutuhkan (*goal difficulty*); (3) Intensitas tujuan, proses menentukan tujuan (*goal intensity*); dan (4) Kadar usaha untuk mencapai tujuan (*commitment*).



Banyak penelitian menunjukkan bahwa tujuan spesifik dan kesukaran tujuan menjadi pertimbangan penting. Tujuan rinci/spesifik mengarah pada hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang bersifat umum, karena tujuan tersebut memberikan sebuah kejelasan bagi tiap individu berkaitan dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Penetapan tujuan yang bersifat spesifik akan mendorong peningkatan prestasi. Demikian pula dengan tingkat kesulitan tujuan, semakin sulit tujuan, semakin tinggi pula tingkat prestasi. Namun hal tersebut terjadi ketika tujuan diterima atau disepakati (*goal acceptance*).

Teori ini juga mengemukakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai target kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika individu berkomitmen dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tingkatannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

Teori ini menggambarkan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja//kinerja. Konsep yang mendasari teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga mengemukakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai target kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai targetnya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa penetapan sasaran yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan mampu meningkatkan kinerja yang diikuti dengan memiliki kompetensi dan keterampilan biaya.



Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) Model Penerimaan Teknologi
kali dikembangkan oleh Davis (1989). Teori ini diadopsi dari *Theory of*

Reasoned Action atau TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premi bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Teori ini membuat model perilaku seseorang sebagai suatu fungsi dari tujuan perilaku, dimana tujuan perilaku ditentukan oleh sikap atas perilaku tersebut.

Reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna atas kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI (Teknologi Informasi), sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan atau perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan penggunaan teknologi informasi.

Mengubah perilaku seseorang bukan hal yang mudah, karena tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus dilakukan melalui anteseden atau penentu atau penyebab perilaku tersebut. Salah satu anteseden perilaku adalah kepercayaan (*belief*) terhadap sistem informasi. Mengubah perilaku dapat dilakukan dengan mengubah kepercayaan individu menjadi sebuah kepercayaan positif untuk menerima sistem teknologi informasi. Pemakai teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan.

TAM dikembangkan dari interaksi manusia-komputer dengan menggabungkan teori psikologi yang menjelaskan tentang perilaku pengguna komputer yang berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), niat (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behaviour*). Model ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dari perilaku pengguna terhadap penerimaan penggunaan teknologi.



Model Penerimaan Teknologi/*Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989) adalah model yang berhasil dan sangat dapat diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu teknologi yang baru diterapkan, seperti sistem informasi. TAM digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna atas aplikasi atau sistem berbasis komputer.

Menurut Davis (dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2011) perilaku seseorang menggunakan TI diawali dengan adanya persepsi mengenai manfaat (*perceived of usefulness*) dan persepsi kemudahan menggunakan TI (*perceived ease of use*). Masing-masing variabel tersebut terdiri dari enam indikator, yaitu: (1) Kebermanfaatan, dengan indikator : mempercepat pekerjaan (*work more quickly*); meningkatkan kinerja (*improve job performance*); meningkatkan produktivitas (*increase productivity*); efektivitas (*effectiveness*); mempermudah pekerjaan (*make job easier*), dan bermanfaat (*useful*); sedangkan (2) kemudahan penggunaan, dengan indikator: mudah dipelajari (*easy to learn*); dapat dikontrol (*controllable*); jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*); fleksibel (*flexibel*); mudah untuk menjadi terampil/mahir (*easy to become skillful*); serta mudah digunakan (*easy to use*). Dengan menggunakan variabel tersebut, maka TAM diharapkan dapat menjelaskan penerimaan pemakai sistem informasi terhadap teknologi informasi itu sendiri.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Robbins (2006:52), kemampuan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri

faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan instik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam

pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah



disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan. Kompetensi meliputi aspek *intent* (niat), *action* (tindakan), dan *outcome* (hasil) (Marwansyah, 2012).

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005).

McClelland (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang dan berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik yang terdiri dari empat karakteristik, antara lain: (a) pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang dalam bidang tertentu; (b) keterampilan, yaitu keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik; (c) peran sosial, yaitu citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain; (d) citra diri, yaitu persepsi individu tentang dirinya; dan (e) *trait*, yaitu karakteristik tingkah laku seseorang yang relatif konstan dalam situasi yang berbeda-beda.

Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Selain itu kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja.



enurut Spencer (1993) bahwa kompetensi juga sebenarnya
 liksi siapa yang berkinerja yang baik dan siapa yang berkinerja kurang
 kur dari kriteria atau standar yang digunakan. Pengertian kompetensi
 ncer (1993) adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan

dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Menurut Spencer (1993), beberapa karakteristik kompetensi terdiri dari:

- a. Watak (*traits*) yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu.
- b. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
- c. Bawaan (*self-concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- d. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
- e. Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Sumber daya merupakan faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya ada di atas kertas saja tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Edward III, indikator-indikator sebagai tolok ukur dalam menilai sumber daya suatu organisasi adalah sebagai berikut :

a. Staf

Staf dalam jumlah yang memadai dan memiliki keterampilan/*skill* dalam melaksanakan tugasnya merupakan sumber daya yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III (1980:79) menemukan bahwa seringkali jumlah staf terlalu kecil dalam menunjang implementasi

akan yang efektif, namun ternyata jumlah staf tidak selalu memberikan positif dalam implementasi kebijakan.

nangan



Kewenangan merupakan faktor penting dalam sumber daya implementasi kebijakan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

c. Informasi yang dimiliki

Informasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana perlu tahu bagaimana cara melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas dalam implementasi kebijakan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Para pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, dan mengerti apa yang harus dilakukan, juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa gedung dan perlengkapan memadai, bisa saja implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil (Edward III, 1980:77).

Pengelolaan aset daerah membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas, termasuk pengetahuan yang sesuai, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap dan sifat (Hastings, 2010:23). Kompetensi merupakan bagian dari perilaku yang terdapat di belakang kinerja kompeten. Kompetensi perilaku menggambarkan tentang seseorang berperilaku ketika mereka mengerjakan tugasnya dengan baik.

Sumber daya manusia pada pemerintah daerah biasanya disebut aparatur daerah harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pegawai Negeri Sipil yang

an sumber daya manusia pemerintah sudah seharusnya memiliki yang kompeten dan profesional.

umber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi atau yang pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu



pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Kompetensi sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset. Menurut tujuannya, pengembangan SDM dalam pengelolaan aset antara lain: 1) untuk mengembangkan keahlian mengurus dan menginventarisir aset daerah sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah. 2) Untuk mengembangkan pengetahuan dalam melakukan pengembangan pengelolaan aset daerah sehingga laporan dapat dilakukan secara rasional. 3) Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemampuan kerjasama antara rekan-rekan pegawai dalam manajemen pengelolaan aset.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan

disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mo, 2002).



2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto (2005:11), sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh semua tingkatan manajemen.

Menurut Gordon B. Davis (1991: 91), sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Raymond McLeod (2010), sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi.

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000). Hall (2001), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.

Sistem informasi adalah kumpulan proses yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi tidak harus terkomputerisasi, walaupun

akan memang komputerisasi (Turban, 2006). Sistem informasi adalah yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan an data dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola,



mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Krismiaji, 2005).

Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Adapun definisi sistem informasi menurut Kristanto (2008) yaitu kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Efektivitas sistem informasi dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Bodnar (2000), beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

- a. Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat

ampunan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal* ss dan kerusakan pada sistem.

ator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi

m permintaan pemakaian sistem.



- c. Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
- d. Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya tetapi juga mengenai informasinya.
- e. Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan maupun penyajian data.
- f. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

Dalam pengelolaan aset daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Teknologi informasi digunakan dalam manajemen aset untuk menghasilkan gambaran informasi siklus aset yang terintegrasi, tidak hanya menjadi pengawasan terhadap manajemen aset, tetapi juga memungkinkan untuk mendukung informasi dalam pengambilan keputusan (Haider, 2011).

Menurut Hall (2001) dalam Kadir (2003:11), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Kadir, 2003:4).

Di antara bermacam-macam jenis sistem informasi, salah satunya adalah *e-government* atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis



Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen (Kadir, 2003:70), antara lain : (1) Perangkat keras (*hardware*), mencakup peranti-sik seperti komputer dan printer; (2) Perangkat lunak (*software*) atau yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk

dapat memproses data; (3) Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. (4) Orang, yakni semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi; dan (5) Basis data (*database*), yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Kadir, 2003).

Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi dalam suatu institusi pemerintahan ditujukan agar suatu institusi pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparatur itu sendiri. Kriteria dari sistem informasi antara lain fleksibel, efektif, dan efisien.

Keberadaan teknologi informasi tidak semata dipandang mampu mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi pekerjaan dan pengambilan keputusan, melainkan mampu: (1) melakukan pengawasan secara langsung terhadap sebuah proses; (2) menyimpan informasi penting dan dapat diakses setiap diperlukan; (3) memperpendek jalur komunikasi dan mempercepat sebuah proses (Cortada, 1995). Selain itu, proses adopsi sistem merupakan hal penting, karena tidak sedikit sistem aplikasi yang gagal akibat faktor manfaat dan kemudahan sebagaimana teori *Technology Acceptance Model* (Davis, 1993).

Grubisic (2009) mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen aset publik sebagai bagian integral dari reformasi sektor publik. Menurut Grubisic (2009), kurangnya informasi mengenai aset publik menghambat proses penentuan nilai aset. Untuk mencapai tujuan manajemen aset



secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam jangka waktu yang singkat, diperlukan sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset atau sistem informasi manajemen aset (SIMA).

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004:36). Tujuan mengembangkan SIMA adalah sebagai alat untuk optimalisasi dan efisiensi pengelolaan aset. Adapun manfaat SIMA adalah untuk tertib administrasi aset; mengetahui pemanfaatan aset tertinggi dan aset terbaik, mempermudah pengendalian aset, mengetahui nilai aset, dan mendukung pengembangan perencanaan strategi (Siregar, 2004:40).

Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing. Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola aset daerah cukup dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan nilai kerugian yang sangat besar akibat kelalaian dalam pengelolaan aset daerah.

Penelitian Grubisic (2009) menemukan bahwa kurangnya informasi tentang aset publik mempersulit penentuan nilai aset, penganggaran untuk kegiatan pengelolaan aset, dan mengevaluasi kinerja portofolio aset publik. Dengan demikian, sistem informasi berperan penting dalam pengelolaan aset publik.



Optimalisasi Pengelolaan Aset/BMD

Definisi aset menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC)

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events. Dimaknai, aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Sementara definisi aset berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010), aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau diperoleh dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Definisi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai



masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah karena signifikan dalam penyajian neraca.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah

dalam kondisi siap pakai.



e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen aset agar barang milik daerah tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk operasional kegiatan pemerintah serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Menurut Jim (2007) dalam Hanis (2009:36), manajemen aset didefinisikan sebagai *a continuous process-improvement strategy for improving the availability, reliability and longevity of assets; that is systems, facilities, equipment and* s, yaitu suatu strategi proses perbaikan yang terus menerus untuk

meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan dan umur panjang dari aset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya.

Menurut Siregar (2004:519) optimalisasi aset adalah satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi :

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang atau pengguna barang serta dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

b. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penggunaan

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah serta dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.



d. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

f. Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

g. Pemindahtanganan

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila barang tidak dapat dipertahankan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan,



ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

j. Penatausahaan

Penatausahaan barang milik daerah dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

Siregar (2004:776), menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagaimana berikut : (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya; (2) Pemanfaatan aset. Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak; dan (3) Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan

cepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3)

evaluasi/monitoring (Sholeh dan Rochmansjah, 2010). Sasaran strategis

yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah, yakni

terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah; (2)



Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; dan (4) Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Menurut Siregar (2004) bahwa optimalisasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*). Untuk mengoptimalkan suatu aset dapat dilakukan melalui *Highest and Best Use Analysis*, Siregar (2004). Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalisasi atau menghilangkan hambatan atau ancaman atas pengelolaan aset-aset tersebut. Sehingga optimalisasi dari suatu aset yang berstatus *idle capacity* bisa dilakukan.

2.1.6 Efektivitas Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Messier *et al.* (2006:250) merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal entitas lain yang didesain untuk memberi keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Committee of Sponsoring Organization (COSO) tahun 1992 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang didesain untuk menghasilkan kapasitas yang layak mengenai pencapaian tujuan, antara lain: (1) Efektivitas dan efisiensi operasi; (2) Keandalan dalam laporan keuangan; dan (4) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Indriasari (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga efisiensi organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan dalam pengelolaan organisasi yang efisien dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Pengendalian intern merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan bagi



pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP menurut PP No. 60 Tahun 2008 berujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2011:20), ada enam sasaran diperlukannya Sistem Pengendalian Intern, yakni : (1) Untuk melindungi aset (termasuk data) negara; (2) Untuk memelihara catatan secara rancid dan akurat; (3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, releva, dan andal; (4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP); (5) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi; dan (6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern terdiri dari lima unsur sebagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian

Yaitu kondisi dalam itas yang menjadi instansi pemerintah dengan membangun kesadaran semua personil mengenai pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

aiian resiko

kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang gancam pencapaian tujuan serta sasaran instansi pemerintah yang



mencakup : kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola resiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

c. Kegiatan pengendalian

Yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan juga penetapan serta pelaksanaan kebijakan maupun prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

e. Pemantauan dan pengendalian intern

Yaitu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberi keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk diserahkan kepada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas



pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah ke dalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Menurut Wilkinson *et al.* (2000:551) tentang kualitas informasi laporan keuangan yaitu:

“The value of information, and hence the soundness of decisions, can be affected by qualities that attach to the information. Useful information qualities are relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, quantifiability, and consistency.”

Menurut Mardiasmo (2009:171), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawabandab pengelolaan (*Accountability*). Laporan yang menjadi sorotan terkait akuntabilitas suatu laporan keuangan adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang terkait dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Laporan ini bersifat *going concern* atau berkelanjutan dari periode satu ke periode berikutnya.

Menurut Wati *et.al.* (2014), Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan publik yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi



keuangan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Wati, 2014). Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas informasi laporan keuangan berbeda antara pengguna (*user*) dan pembuat/penyusun (*preparer*) informasi laporan keuangan.

Penelitian dari sisi pengguna (*user*) Xu *et al.* (2003) dan Ahmed *et al.* (2011), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan berkualitas apabila tepat waktu (*up to date*) agar dapat dipakai sebagai alat pengambil keputusan. Temuan ini membawa masalah bagi penyusun laporan keuangan. produk akhir (*final product*) dari informasi laporan keuangan melalui siklus akuntansi sistematis dan proses audit oleh kantor akuntan yang membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat.



Penelitian dari sisi penyusun dilakukan oleh Verlun *et al.* (2011), latridis Barth *et al.* (2008) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan as apabila memenuhi peraturan atau standar akuntansi keuangan. kriteria tersebut akan menjadi masalah bagi pengguna (*user*) yang tidak

memahami istilah-istilah yang ada dalam standar akuntansi keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur, antara lain :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil

masa lalu dan kejadian masa kini.

tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh

dan berguna dalam pengambilan keputusan.



- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal (*Reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyajian Jujur (*representational faithfulness*). Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang sama atau tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang disebut andal jika informasi yang termuat dalam laporan keuangan jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada periode yang sama. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan



kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antara laporan keuangan yang disajikan periode bersangkutan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Hal ini untuk memastikan kesinambungan, konsistensi dan kelengkapan informasi yang disajikan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas atau kehandalan Sistem Pengendalian

terdapat lima jenis opini yang diberikan BPK yaitu : opini Wajar Tanpa
 aian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
 (WTP DPP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak



Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (*dislaimer of opinion*). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, karena opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2.2. Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan adalah:

Hanis *et al* (2011) dalam jurnal *Journal of Corporate Real Estate*. Vol. 13 No.1 dengan judul *The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government : A Case Study in South Sulawesi Province*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang signifikan dan perlu penanganan diantaranya tidak adanya kerangka hukum dan kelembagaan manajemen aset, sikap pemerintah daerah terhadap aset publik, aspek lintas hukum dalam pengelolaan aset publik, kompleksitas tujuan organisasi publik, inefisiensi ekonomi terkait dengan barang publik, data yang dibutuhkan dalam pengelolaan barang publik tidak tersedia, dan kendala sumber daya manusia (SDM).

Zuliarti (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kapasitas SDM tidak berpengaruh.

Hanis (2012) melakukan penelitian dengan judul *A Public Asset Management Framework for Indonesian Local Government*. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa praktek manajemen aset daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan publik. Peningkatan tersebut dilakukan melalui inventarisasi aset, sistem manajemen data persediaan aset, kepemilikan aset daerah, pengaturan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Sementara itu, terdapat faktor yang mempengaruhi manajemen aset pemerintah daerah, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. serta temuan lainnya. Kerangka manajemen aset dalam konteks pemerintah daerah harus layak dan dapat dilaksanakan serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Azhar dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa secara parsial kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sedangkan regulasi dan sistem informasi secara parsial berpengaruh terhadap manajemen aset. Sementara Secara simultan kualitas aparatur daerah, regulasi dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset.

Peki (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effectiveness Of Local Asset Management : A Study on The Government of Jayapura*. Hasilnya adalah (1) Penerapan manajemen aset memainkan peran penting dalam pemanfaatan dan upaya untuk mencapai keamanan aset daerah yang tepat dengan peraturan Walikota, serta pelatihan pengendalian dan pemantauan dilakukan dengan aset dan instansi teknik keuangan sebagai intruksi kepala

(2) kuntabilitas publik berperan penting terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. (4) Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan, bakat dan



koordinasi merupakan aspek penting dalam menunjang efektivitas pengelolaan aset daerah.

Alan Wonggow (2014) dengan judul penelitian Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, hanya saja ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti dari segi waktu yang kurang efisien dalam penyampaian RKBU, dan RKPBU, serta adanya kelalaian dalam penerimaan dan penyaluran barang. Petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang milik daerah sehingga sebaiknya diikutsertakan dalam pelatihan diklat dan bimtek agar dapat meningkatkan keterampilannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Begitupun dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Naomi (2016) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komepetsi

daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

unita (2016) meneliti tentang Optimalisasi Pengelolaan Aset dan nya terhadap Kualitas Laporan keuangan pada Pemerintah Kota Palopo.



Hasil penelitian meunjukkan bahwa sistem informasi, kewenangan dan pengembangan SDM, kemampuan kerjasama dan jumlah pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset dan optimalisasi pengelolaan aset berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

